

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, L. (1995). *Guidelines for Preparing Urban Plans*. Washington DC: APA Planners Press.
- Arimurty, A., & Manaf, A. (2012). *Kemitraan Pemerintah Daerah, Lembaga Lokal, dan Masyarakat dalam Pemenuhan Kebutuhan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah*. Universitas Diponegoro.
- Badan Pusat Statistik. (2011). Kecamatan Banyumanik dalam Angka 2012.
- Badan Pusat Statistik. (2012). Kota Semarang Dalam Angka 2012.
- Balitbang. (2012). RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat). *Kementerian Pekerjaan Umum*. Retrieved from <http://litbang.pu.go.id>
- Bank BTN. (2013). KPR BTN Sejahtera FLPP. *Bank BTN*. Retrieved from <http://www.btn.co.id>
- Bapertarum-PNS. (2013). Bantuan Uang Muka. *www.Bapertarum-PNS.co.id*. Retrieved from www.bapertarum-pns.co.id
- Bappenas. (2012). Penanggulangan Kemiskinan Kota Semarang. Retrieved February 24, 2014, from www.bappenas.go.id
- BPJS Ketenagakerjaan. (2014). Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP). *BPJS Ketenagakerjaan*. Retrieved from <http://www.jamsostek.co.id>
- Chiara, J. De, & Koppelman, L. E. (1978). *Standar Perencanaan Tapak* (pp. 187–189). Jakarta: Erlangga.
- Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Kemenpera. (2013). Buku Panduan Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kementerian Perumahan Rakyat.
- Dirjen Penataan Ruang, & Departemen Pekerjaan Umum. (2007). Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya.
- Diskusi Kemitraan dalam Pembangunan Perumahan Swadaya. (2013). Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya untuk MBR/Masyarakat Miskin.
- Doxiadis, C. A. (1968). *An Introduction to the Science of Human Settlements*. London: Hutchinson and Co, Ltd.
- Fischler, R. (2011). Fifty Theses on Urban Planning and Urban Planners. *Journal of Planning Education and Research*, 32(1), 107–114. doi:10.1177/0739456X11420441
- Hapsari, I. (2011). *Efektifitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Pinggiran Kota Semarang dalam Pemenuhan Kebutuhan Rumah*. UNIVERSITAS DIPONEGORO.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2012). Strategi. 2012.
- Kemenpera. (2005). Petunjuk Teknis Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri. Kemenpera.
- Kepmen Kimpraswil No. 403. (2002). Pedoman Umum Rumah Sederhana Sehat.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No.187. (2004). Penetapan Pembentukan dan Pengangkatan Menteri-menteri Kabinet Indonesia Bersatu.
- Kuswartojo, T. (2005). *Perumahan dan Pemukiman di Indonesia, Upaya Membuat Perkembangan Kehidupan yang Berkelanjutan*. Bandung: Penerbit ITB.

- Kwanda, T. (2000). Penerapan Konsep Perencanaan dan Pola Jalan dalam Perencanaan Realestat di Surabaya. *Dimensi Teknik Arsitektur*, 28(2), 106–113.
- Mahardini, I. (2012). Analisis Pengaruh Harga, Pendapatan, Lokasi, dan Fasilitas terhadap Permintaan Rumah Sederhana. eprints.undip.ac.id.
- Menteri Keuangan No.31. (2011). Pembebasan Pajak Pertambahan Nilau (PPN) Bagi Rumah Sejahtera. Menteri Keuangan.
- Miles, M. B., & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Nurwanto, I. (2011). Kebijakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Jakarta: Kementrian Perumahan Rakyat.
- Panudju, B. (1999). *Pengadaan Perumahan Kota dengan Peran Serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah*. (Alumni, Ed.). Bandung.
- Perda Kota Semarang No.14 Tahun 2011. (n.d.). RTRW Kota Semarang. Semarang.
- Perda Kota Semarang No.8 Tahun 1999. (n.d.). RDTRK Kecamatan Banyumanik. Kota Semarang: Pemerintah Daerah Kota Semarang.
- Permenpera No 10. (2012). Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang. Berita Negara Republik Indonesia.
- Permenpera No.14. (2012). Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Perumahan Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera dengan Dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Menteri Perumahan Rakyat.
- Permenpera No.27. (2012). Pengadaan Perumahan Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera dengan Dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Menteri Perumahan Rakyat.
- Permenpera No.6. (2013). Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Menteri Perumahan Rakyat.
- Perumahan Harus Memiliki Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial. (2012). *Media Kajian dan Informasi Tata Ruang*. Retrieved February 03, 2014, from <http://www.tataruangindonesia.com/>
- Perumnas. (2013). Rumah Kita. Buletin Perumnas.
- Prasetyo, B., & Jannah, L. M. (2005). *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Purbaya, A. A. (2013). UMK 2014 di Jateng, Tertinggi Semarang, Terendah Purworejo. *detikNews*. Retrieved from <http://news.detik.com>
- Ramadhan, J., Maulana, K. K., Agustina, K. W., & Griaphon, K. V. (2013). Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Semarang. Retrieved from <http://www.share-pdf.com/>
- SNI. (2004). Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. Badan Standarisasi Nasional.
- SP2J. (2013). Pengelolaan Kawasan Kumuh Kota Palembang. Palembang: SP2J.
- Stone, M. E. (1993). *Shelter Poverty: New Ideas on Housing Affordability* (p. 235). Philadelphia: Temple University Press.
- Tunas, D., & Peresthu, A. (2010). The self help housing in Indonesia The only option for the poor. *Habitat International*, 34, 315–322.

- UMR Upah Minimum Regional Terbaru. (2014). *Info Lowongan Kerja Depnaker*. Retrieved February 10, 2014, from <http://infokerjadepnaker.blogspot.com/2013/>
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1. (2011). Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.4. (1992). Perumahan dan Permukiman.
- UU No. 1. (2011). Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Warnocka, V. C., & Warnockc, F. E. (2008). Markets and housing finance. *Journal of Housing Economics Journal*, 17, 239–251.